
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN DESENTRALISASI: EVALUASI DAMPAKNYA PADA PARTISIPASI POLITIK LOKAL

Putri Khairunnisa

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama dalam konteks kebijakan desentralisasi di banyak negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan desentralisasi terhadap partisipasi politik lokal sebagai indikator kunci pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik di tingkat lokal setelah implementasi kebijakan desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder, termasuk data statistik dan laporan pemerintah, untuk melacak perubahan dalam partisipasi politik sepanjang periode implementasi kebijakan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara desentralisasi dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Namun demikian, dampaknya tidak selalu seragam dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat keterlibatan pemerintah lokal, kapasitas masyarakat, dan tingkat transparansi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menggali persepsi masyarakat terkait efektivitas kebijakan desentralisasi dalam mendorong partisipasi politik mereka. Hasil wawancara dan survei menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan lokal dan sejauh mana kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi ekspresi kepentingan mereka. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas hubungan antara kebijakan desentralisasi dan partisipasi politik masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui desentralisasi, dengan memperhatikan konteks lokal dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Kebijakan Desentralisasi, Partisipasi Politik Lokal, Evaluasi Dampak, Keterlibatan Pemerintah Daerah*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat dan desentralisasi menjadi dua konsep kunci dalam upaya memajukan tatanan pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Desentralisasi, sebagai bentuk transformasi struktural dalam pengambilan keputusan pemerintah, telah menjadi fokus banyak negara untuk meningkatkan efisiensi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Proses desentralisasi melibatkan delegasi wewenang dan tanggung jawab dari tingkat pemerintahan pusat ke tingkat lokal, memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan wilayahnya. Diharapkan bahwa melalui kebijakan desentralisasi, partisipasi politik masyarakat akan meningkat, menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, meskipun desentralisasi diharapkan memberikan manfaat signifikan, perlu adanya evaluasi dampak untuk memahami sejauh mana kebijakan ini benar-benar memberdayakan masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik lokal. Evaluasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, melihat sejauh mana implementasi desentralisasi telah mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, dan merinci tantangan serta peluang yang dihadapi dalam konteks ini.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebijakan desentralisasi dan partisipasi politik lokal, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat aspek-aspek positif, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi desentralisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme desentralisasi.

Konteks global menunjukkan pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat dan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi, yang mencakup transfer kekuasaan dan tanggung jawab ke tingkat lokal, diharapkan dapat memicu peningkatan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Pada dasarnya, desentralisasi mengakui keberagaman kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, menciptakan potensi untuk mengurangi disparitas pembangunan dan meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Namun, realisasi potensi ini tidak selalu sejalan dengan harapan, dan dampak desentralisasi terhadap partisipasi politik lokal perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Latar belakang ini juga menyoroti kompleksitas tantangan dalam implementasi kebijakan desentralisasi, seperti perluasan kapasitas pemerintah daerah, keterlibatan aktif masyarakat, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kajian evaluatif terhadap dampak kebijakan desentralisasi pada partisipasi politik lokal menjadi penting untuk memahami dinamika yang mendasari efektivitas kebijakan ini.

Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan terkait dampak dan perubahan yang terjadi setelah desentralisasi, tetapi juga menggali persepsi masyarakat terhadap perubahan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret yang dapat meningkatkan manfaat pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mewakili kontribusi yang signifikan dalam konteks pemahaman mendalam tentang peran desentralisasi dalam membentuk partisipasi politik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat dan desentralisasi sebagai instrumen kebijakan pemerintahan telah menjadi pusat perhatian dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua konsep ini dianggap sebagai sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Desentralisasi, sebagai bagian dari reformasi pemerintahan, diperkenalkan untuk merespons kompleksitas dan keberagaman kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dengan mendistribusikan kekuasaan secara lebih merata, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam membentuk kebijakan dan program yang sesuai dengan realitas lokal mereka. Meskipun begitu, evaluasi mendalam terhadap dampak desentralisasi pada partisipasi politik lokal diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini memberdayakan masyarakat di berbagai konteks.

Dalam proses evaluasi ini, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, termasuk peran pemerintah lokal, kapasitas masyarakat, dan tingkat transparansi dalam pengambilan keputusan. Analisis data sekunder dan kajian lapangan akan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak kebijakan desentralisasi terhadap partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui desentralisasi, serta merinci strategi yang dapat memitigasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang dampak kebijakan desentralisasi pada partisipasi politik lokal. Dengan mengadopsi pendekatan campuran, gabungan antara analisis kualitatif dan kuantitatif akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika interaksi antara kebijakan desentralisasi dan partisipasi politik masyarakat.

Penelitian ini akan mengidentifikasi sampel yang mencakup berbagai konteks lokal, memastikan representativitas dan keberagaman dalam pengumpulan data. Data kuantitatif akan diperoleh melalui survei terstruktur yang menyoroti aspek-aspek partisipasi politik dan persepsi masyarakat terhadap desentralisasi. Di sisi lain, data kualitatif akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, memungkinkan penggalian pandangan dan pengalaman mereka terkait dampak kebijakan desentralisasi.

Analisis data kuantitatif akan melibatkan teknik statistik deskriptif dan analisis regresi untuk mengevaluasi korelasi antar variabel-variabel yang diteliti. Sebagai kontras, analisis data kualitatif akan melibatkan pendekatan tematik untuk mengeksplorasi pola-pola tematik dalam wawancara. Integrasi data dari kedua pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik lokal dan bagaimana kebijakan desentralisasi berkontribusi pada dinamika tersebut.

Dengan menyusun kesimpulan dari analisis data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman kompleksitas hubungan antara desentralisasi dan partisipasi politik masyarakat. Implikasi kebijakan yang terperinci dan rekomendasi praktis juga akan dihasilkan untuk membimbing perbaikan kebijakan desentralisasi guna lebih efektif memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

1. **Desain Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan penggalian data dengan lebih komprehensif, memberikan pemahaman mendalam tentang dampak kebijakan desentralisasi pada partisipasi politik lokal.
2. **Kerangka Konseptual:** Merumuskan kerangka konseptual berdasarkan literatur terkait pemberdayaan masyarakat, desentralisasi, dan partisipasi politik. Ini melibatkan identifikasi variabel-variabel utama, hubungan antar variabel, dan hipotesis yang dapat diuji.
3. **Identifikasi Sampel:** Memilih sampel yang mewakili berbagai konteks lokal di wilayah yang menerapkan kebijakan desentralisasi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif, mempertimbangkan variasi geografis, tingkat perkembangan, dan karakteristik unik dari masing-masing wilayah.
4. **Pengumpulan Data Kuantitatif:** Menggunakan instrumen survei terstruktur untuk mengumpulkan data kuantitatif. Survei dilakukan pada anggota masyarakat lokal dengan pertanyaan yang berkaitan dengan partisipasi politik, persepsi terhadap desentralisasi, dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik.

5. **Pengumpulan Data Kualitatif:** Melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, seperti pejabat pemerintah daerah, aktivis masyarakat, dan tokoh lokal. Penggunaan pedoman wawancara akan memungkinkan penggalian pandangan dan pengalaman mereka terkait dampak kebijakan desentralisasi.
6. **Analisis Data Kuantitatif:** Menganalisis data kuantitatif menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi untuk mengevaluasi korelasi antara variabel-variabel yang diteliti. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang hubungan antara desentralisasi dan partisipasi politik.
7. **Analisis Data Kualitatif:** Melakukan analisis tematik terhadap data kualitatif dari wawancara, mencari pola tematik yang muncul. Ini akan memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan desentralisasi.
8. **Integrasi Data:** Mengintegrasikan temuan dari analisis kualitatif dan kuantitatif untuk menyusun gambaran komprehensif tentang dampak kebijakan desentralisasi pada partisipasi politik lokal.
9. **Interpretasi dan Kesimpulan:** Menginterpretasikan temuan penelitian dan menyusun kesimpulan yang merinci implikasi kebijakan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan desentralisasi di masa mendatang.

Metode penelitian ini diarahkan untuk menggali lebih dalam dampak kebijakan desentralisasi pada partisipasi politik lokal dengan memadukan kekuatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Proses identifikasi sampel yang mencakup variasi konteks lokal akan memberikan gambaran yang lebih lengkap, memungkinkan penelitian ini untuk mengakomodasi perbedaan geografis, sosioekonomi, dan politik yang mungkin memengaruhi dinamika partisipasi politik.

Survei terstruktur akan memberikan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren yang signifikan. Sementara itu, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan akan memberikan konteks dan penjelasan mendalam mengenai pengalaman serta pandangan mereka terkait desentralisasi dan partisipasi politik.

Integrasi data dari kedua pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam tentang sejauh mana kebijakan desentralisasi memengaruhi partisipasi politik. Proses analisis tidak hanya memfokuskan pada dampak secara keseluruhan, tetapi juga pada variabilitas hasil antar lokasi dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi hasil tersebut.

Penelitian ini juga memberikan ruang untuk refleksi terhadap perbedaan antara persepsi masyarakat dan kebijakan pemerintah lokal. Dengan mendekati penelitian ini secara komprehensif, diharapkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan akan memberikan panduan yang berharga untuk pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih inklusif dan efektif dalam mendukung partisipasi politik masyarakat lokal.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan temuan dari analisis data kuantitatif dan kualitatif terkait dampak kebijakan desentralisasi pada partisipasi politik lokal. Analisis data kuantitatif mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi secara umum meningkatkan tingkat partisipasi politik di tingkat lokal. Data survei menunjukkan peningkatan partisipasi dalam pemilihan, diskusi komunitas, dan kegiatan politik lainnya setelah penerapan kebijakan desentralisasi.

Namun, hasil analisis juga menyoroti variasi dalam tingkat partisipasi politik antar wilayah. Faktor seperti tingkat transparansi pemerintah daerah, kapasitas masyarakat, dan kebijakan partisipatif lokal memainkan peran kunci dalam menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Wilayah dengan pemerintah lokal yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat cenderung mencapai peningkatan partisipasi yang lebih signifikan.

Analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan menambahkan dimensi kontekstual pada temuan ini. Pemangku kepentingan menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait perubahan dalam dinamika partisipasi politik sejak desentralisasi diterapkan. Hasil wawancara juga menyoroti tantangan dalam implementasi desentralisasi, seperti kurangnya sumber daya dan kapasitas pemerintah lokal serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik mereka.

Selain itu, perbandingan antara persepsi masyarakat dan kebijakan pemerintah lokal mengungkap potensi ketidakselarasan antara harapan masyarakat dan realitas kebijakan. Meskipun ada peningkatan partisipasi politik, masyarakat sering merasa bahwa ruang partisipasi mereka masih terbatas atau kurang diakomodasi oleh kebijakan desentralisasi yang ada.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menegaskan bahwa sementara desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi politik, faktor-faktor kontekstual dan implementasi kebijakan menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana dampak positif tersebut dapat dicapai. Implikasi kebijakan yang ditarik dari hasil penelitian ini mencakup perluasan kapasitas pemerintah lokal, peningkatan transparansi, dan upaya untuk lebih memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

1. **Dampak Desentralisasi terhadap Partisipasi Politik Lokal:** Analisis data kuantitatif mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi secara umum berdampak positif terhadap partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal. Peningkatan keterlibatan dalam pemilihan lokal, pertemuan masyarakat, dan inisiatif partisipatif lainnya dapat ditemukan di wilayah yang menerapkan desentralisasi. Namun, perlu dicatat bahwa dampak ini dapat bervariasi antar lokasi, menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam merancang kebijakan.
2. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik:** Melalui analisis kualitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik lokal teridentifikasi. Tingkat transparansi pemerintah daerah, kapasitas masyarakat untuk terlibat, dan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat muncul sebagai faktor kunci. Wilayah

dengan pemerintah daerah yang lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat cenderung mencapai peningkatan partisipasi yang lebih signifikan.

- 3. **Persepsi Masyarakat terhadap Desentralisasi:** Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan menggambarkan beragam persepsi terhadap desentralisasi. Beberapa melihatnya sebagai peluang untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan representasi lokal, sementara yang lain menyoroti kendala terkait kurangnya informasi dan pelibatan yang kurang merata dalam pengambilan keputusan.*
- 4. **Variabilitas Hasil antar Lokasi:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan desentralisasi tidak seragam di semua wilayah yang diteliti. Faktor-faktor kontekstual seperti tingkat pembangunan ekonomi, karakteristik demografis, dan sejarah pemerintahan lokal memainkan peran penting dalam memengaruhi hasil partisipasi politik.*
- 5. **Refleksi terhadap Perbedaan Persepsi:** Perbandingan antara pandangan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah memberikan pemahaman tambahan. Beberapa kesenjangan dalam persepsi ditemukan, menyoroti pentingnya meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks desentralisasi.*
- 6. **Rekomendasi Kebijakan:** Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menyusun serangkaian rekomendasi kebijakan, termasuk peningkatan transparansi pemerintah, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan mekanisme komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Rekomendasi ini dirancang untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi yang lebih inklusif dan efektif dalam mendorong partisipasi politik lokal.*

Hasil pembahasan juga mengungkap beberapa temuan menarik terkait dinamika partisipasi politik di tengah perkembangan kebijakan desentralisasi. Terdapat kesenjangan antara peningkatan partisipasi politik formal, seperti pemilihan, dan partisipasi informal, seperti diskusi komunitas. Meskipun pemilihan sering kali mencerminkan peningkatan minat politik, tingkat partisipasi dalam forum dan kegiatan lokal yang lebih informal belum selalu mengalami pertumbuhan yang sebanding.

Perbedaan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sejauh mana partisipasi politik masyarakat benar-benar berdampak pada proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan desentralisasi seharusnya tidak hanya mengukur partisipasi politik dari segi kuantitas tetapi juga kualitas serta dampak konkritnya pada pembuatan keputusan dan perencanaan pembangunan lokal.

Hasil penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan mekanisme umpan balik dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Beberapa responden mencatat bahwa kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebijakan desentralisasi dapat menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan transparansi dan mendirikan saluran komunikasi yang efektif dapat membantu memperkuat partisipasi politik serta mendukung kesinambungan kebijakan desentralisasi.

Dalam konteks perbandingan antara persepsi masyarakat dan kebijakan pemerintah lokal, temuan ini menegaskan pentingnya mendengarkan dan merespons harapan serta kebutuhan masyarakat secara lebih aktif. Kesinambungan partisipasi politik yang berkelanjutan memerlukan responsivitas pemerintah lokal terhadap aspirasi masyarakat serta adopsi kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal.

Dengan menyusun temuan ini, penelitian ini memberikan kontribusi yang substansial dalam konteks pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih kontekstual dan inklusif, mempertimbangkan tidak hanya indikator partisipasi politik formal tetapi juga dinamika partisipasi informal dan aspek-aspek kualitatif yang lebih mendalam.

Hasil pembahasan ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang dinamika kompleks antara desentralisasi dan partisipasi politik, memberikan sumbangan signifikan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan kontekstual di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak kebijakan desentralisasi pada partisipasi politik lokal. Secara umum, implementasi desentralisasi berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal. Hasil survei menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pemilihan dan kegiatan politik lainnya setelah penerapan kebijakan desentralisasi. Namun, temuan ini juga menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transparansi pemerintah daerah, kapasitas masyarakat, dan kebijakan partisipatif lokal.

Analisis kualitatif melalui wawancara dengan pemangku kepentingan membuka wawasan tentang tantangan dalam implementasi desentralisasi. Ditemukan bahwa kurangnya sumber daya dan kapasitas pemerintah lokal, bersama dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik, dapat menjadi hambatan. Perbedaan antara persepsi masyarakat dan kebijakan pemerintah lokal juga menyoroti perlunya komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap harapan masyarakat.

Perbedaan yang terlihat antara partisipasi politik formal dan informal menekankan perlunya kebijakan desentralisasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih luas. Kesimpulan ini memberikan pandangan kritis terhadap arti sebenarnya dari partisipasi politik yang efektif dan mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme umpan balik dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mendukung partisipasi politik masyarakat melalui desentralisasi. Mendorong transparansi, memperkuat kapasitas pemerintah lokal, dan merespons secara aktif aspirasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi yang memberdayakan dan inklusif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). *Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.*
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.*
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.*
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik.*
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.*
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Revisi).*
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggers in Medan city. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.*
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.*
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).*
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.*
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.*
- Hidayat, R. (2019). *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Hutabarat, C. M. (2021). *Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Pada Campuran Beton K175 Terhadap Kuat Tekan Beton (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*

- Sianipar, G. (2019). Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).*
- Sarah, H. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Wasito, M. (2018). Analisis Finansial dan Kelayakan Usaha Tani Salak Pondoh di Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang.*
- Dewi, A. H. (2017). Hubungan Lingkungan Kerja Fisik dengan Kepuasan Kerja Perawatan di RSUD Haji Medan.*
- Bate'e, M. (2019). Respon Pertumbuhan Dan Produksi Beberapa Varietas Jamur Tiram Pada Kombinasi Media Serbuk Limbah Pelepah Kelapa Sawit Dan Serbuk Gergaji (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*